

LAMPIRAN XXXIII  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KARANGANYAR  
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2025

# KATA PENGANTAR


---

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 Kabupaten Karanganyar dapat diselesaikan. Dokumen Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan menjadi acuan bagi penyusunan program dan kegiatan kedepannya.

Penyusunan dokumen perencanaan ini berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan berdasarkan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah di lingkup Kecamatan Karanganyar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat daerah di Kecamatan Karanganyar yang telah menyediakan data dan informasi serta masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga penyusunan ini bermanfaat bagi kemajuan Kecamatan Karanganyar dimasa mendatang.

Karanganyar, September 2025  
Camat Karanganyar



Sujatno S.E., M.M.  
NIP. 19700622 199003 1 002

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
DAFTAR GAMBAR			iv
BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1 Latar Belakang	I-	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-	4
	1.4 Sistematika Penulisan	I-	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-	1
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-	1
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II-	20
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-	1
	3.1 Tujuan dan Sasaran	III-	1
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	III-	3
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-	1
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-	1
	4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan	IV-	19
	4.3 Indikator Kinerja Utama	IV-	15
BAB V	PENUTUP	V -	1
	5.1 Kaidah Pelaksanaan	V -	1
	5.2 Pedoman Transisi	V -	1
	5.3 Pedoman penyusunan evaluasi dalam manajemen pengelolaan	V -	2

## DAFTAR TABEL

---

Tabel	2.1	Jumlah PNS di Kecamatan Karanganyar sesuai golongan Tahun 2025	II-3
Tabel	2.2	Jumlah PNS di Kecamatan sesuai pendidikan Tahun 2025	II-4
Tabel	2.3	Jumlah Aset yang dimiliki Kecamatan Karanganyar Tahun 2024	II-5
Tabel	2.4	Jumlah Kelembagaam di Kecamatan Karanganyar Tahun 2024	II-11
Tabel	2.5	Kinerja Penyelenggara pelayanan Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2024	II-14
Tabel	2.6	Capaian Anggaran Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2024	II-17
Tabel	2.7	Target dan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Tahun 2021-2024	II-19
Tabel	2.2.1	Permasalahan dan Akar Permasalahan	II-23
Tabel	2.2.2	Isu Strategis Kecamatan Karanganyar	II-24
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanganyar	III-2
Tabel	3.2	Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra 2025-2029	III-5
Tabel	3.3	Arah Kebijakan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029	III-6
Tabel	3.4	Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang di delegasikan ke Kabupaten/Kota	III-9
Tabel	4.1	Program sasaran outcome, output, program kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-4
Tabel	4.2	Program Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif	IV-5
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanganyar	IV-9

# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 2.1	Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Karanganyar	II-10
Gambar 4.1	Pohon Kinerja	IV-15

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Kecamatan Karanganyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra Kecamatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, perlu menyusun dokumen perencanaan lima tahunan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah.

Renstra ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Renstra Kabupaten Karanganyar disusun dalam rangka mencapai Visi RPJMD **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera** dengan misi **Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik**. Pada misi ini mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan pengelolaan keuangan daerah, efisiensi dan efektifitas, peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan berbasis teknologi dan penguatan pencapaian Merit Sistem melalui peningkatan kompetensi ASN, penguatan tata kelola kepegawaian dan penguatan sistem kepegawaian. Kecamatan menunjang pencapaian tujuan daerah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah, dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik.

Sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bupati di wilayah kecamatan, Kecamatan Karanganyar memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan daerah melalui fungsi koordinasi lintas sektor, fasilitasi kegiatan pembangunan, serta pelayanan administratif kepada masyarakat. Tantangan pembangunan di wilayah Kecamatan Karanganyar antara lain

meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar dan sosial yang merata.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Karanganyar.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Kecamatan Karanganyar daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang memuat program dan kegiatan.

#### 1.4. **Sistematika**

Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, memuat gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN**, memuat tujuan renstra perangkat daerah, sasaran renstra perangkat daerah, strategi perangkat daerah, arah kebijakan perangkat daerah
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, memuat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kedudukan Kecamatan dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun uraian tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

##### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

**4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.

**5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

**6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan Sosial.

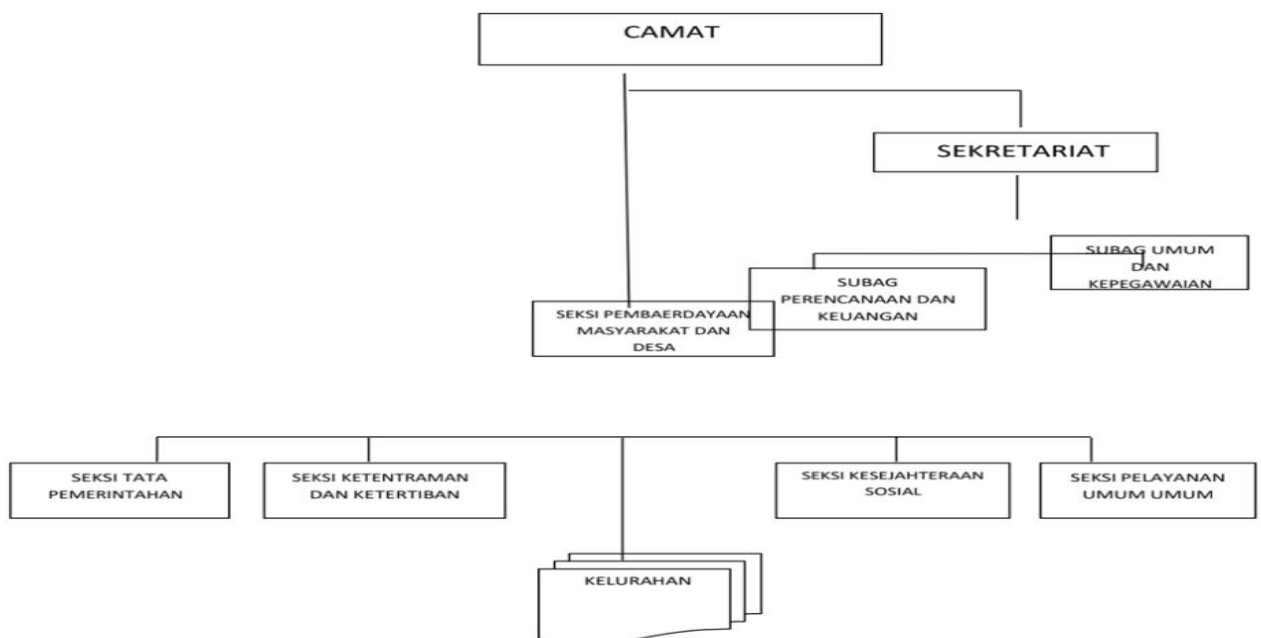
**7. Kepala Seksi Pelayanan Umum**

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

**8. Kelurahan**

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah. Kelurahan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Karanganyar

## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 menunjukkan distribusi 85 orang PNS di Kecamatan Karanganyar tahun 2024 menurut golongan. Golongan II hanya memiliki 14 orang PNS terdiri dari laki-laki 11 dan perempuan 3. Golongan III merupakan yang terbanyak dengan 61 orang, terdiri dari 35 laki-laki dan 26 perempuan. Golongan IV menempatkan 10 orang PNS, yaitu 5 laki-laki dan 5 perempuan. Tidak terdapat PNS pada Golongan I. Secara keseluruhan, jumlah PNS di kecamatan ini adalah 85 orang, terdiri dari 51 laki-laki dan 34 perempuan.

**Tabel 2.1.**

**Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Sesuai Golongan Tahun 2025**

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	11	3	14
2	Golongan III	35	26	61
3	Golongan IV	5	5	10
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>	<b>34</b>	<b>85</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kec. Karanganyar (2025)*

Tabel 2.2 memperlihatkan komposisi 85 orang PNS di Kecamatan Karanganyar tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan. Tidak ada PNS yang berpendidikan SMP sederajat, sedangkan lulusan SMA sederajat tercatat 17 orang. Lulusan D3 juga berjumlah 5 orang. Mayoritas PNS memiliki gelar sarjana, yaitu 44 orang S1. Selain itu terdapat 19 orang lulusan S2. Data ini menggambarkan bahwa mayoritas PNS di kecamatan ini telah menempuh pendidikan perguruan tinggi strata satu dan dua untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Sesuai Pendidikan Tahun 2025**

*Sumber : Data Kepegawaian Kec. Karanganyar (2025)*

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah (orang)
		ASN	Non ASN	
1	SD	0	1	1
2	SMP Sederajat	0	2	2
3	SMA Sederajat	17	72	89
4	D1	0	5	5
5	D2	1	1	2
6	D3	4	12	16
7	D4	0	5	5
8	S1	44	43	87
9	S2	19	0	19
	Jumlah	85	141	226

## 2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Karanganyar telah dilengkapi dengan beragam sarana dan prasarana dalam kondisi baik. Terdapat 1 unit tanah dan bangunan kantor pemerintah permanen yang menjadi pusat kegiatan administratif. Untuk menunjang mobilitas operasional lapangan, tersedia 1 unit kendaraan station wagon dan 47 unit sepeda motor, serta 1 unit alat pemeliharaan tanaman lainnya yang membantu dalam merawat lingkungan kantor.

Fasilitas penunjang kegiatan administrasi dan pengarsipan mencakup 13 unit almari besi, 4 rak besi, 18 rak kayu, serta 96 unit filling cabinet berbahan besi untuk arsip dinamis. Dilengkapi pula dengan 39 unit lemari kayu, 9 lemari arsip khusus, dan 1 lemari kaca. Kebutuhan ruang kerja dan rapat difasilitasi dengan 99 meja rapat, 26 meja pejabat, 193 meja kayu, serta 14 meja tamu biasa dan 14 meja resepsionist. Untuk mendukung kenyamanan, tersedia 198 kursi rapat, 36 kursi tamu, 368 kursi biasa, 74 kursi pejabat, 26 kursi pejabat eselon IV, dan 112 kursi putar.

Dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, Kecamatan Karanganyar memiliki 51 unit PC desktop, 133 unit laptop, 134 printer, 13 monitor, 2 mesin scanner, serta 1 handycam untuk dokumentasi. Keamanan didukung dengan 5 unit CCTV. Untuk keperluan presentasi dan komunikasi, tersedia 24 sound system, 36 televisi, 1 dispenser, dan 14 mimbar/podium. Fasilitas pendukung lainnya mencakup 135 unit kipas angin, 13 kulkas, 34 set peralatan rumah tangga kantor, dan 14 unit meja tamu tambahan serta 5 kursi tamu khusus di ruang pejabat.

Secara keseluruhan, sebanyak 161 jenis barang telah terinventarisasi di Kecamatan Karanganyar dan semuanya tercatat dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan kesiapan perangkat dan sarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan publik dan urusan pemerintahan secara optimal.

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Aset yang Dimiliki Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi Barang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Gambar Presiden	13	Baik
2	Gergaji Senso	1	Baik
3	Handy Cam	1	Baik
4	Hand Talk	3	Baik
5	Internet	2	Baik
6	Keyboard	2	Baik
7	Ac Split	36	Baik
8	Ac Window	25	Baik
9	Alat Angkut Darat Bermotor Lainnya	4	Baik
10	Alat Dapur Lainnya	1	Baik
11	Alat Kantor Lainnya	12	Baik
12	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	Baik
13	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1	Baik
14	Alat Pemadam Portabel	1	Baik
13	Alat Pemanas Ruangan	1	Baik
16	Alat Pembersih Lainnya	25	Baik
17	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan /Ternak Lainnya	1	Baik
18	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
19	Alat Rumah Tangga	34	Baik
20	Alat Studio Lainnya	4	Baik
21	Amplifier	2	Baik
22	Alat Tennis Meja	2	Baik
23	Audio Monitor Aktif	1	Baik
24	Bangku Tunggu	13	Baik
25	Buffet Kaca	1	Baik
26	Buffet Kayu	1	Baik

27	Brankas	1	Baik
28	Camerea Elektronik	3	Baik
29	Camera Film	4	Baik
30	Camera Vidio	11	Baik
31	Cctv	5	Baik
32	Cpu	2	Baik
33	Dispenser	1	Baik
34	Display	2	Baik
35	Exhaust Fan	4	Baik
36	Faksimili	1	Baik
37	Filing Cabinet Besi	96	Baik
38	Focusing Screen	1	Baik
39	Gergaji Senso	1	Baik
40	Korden	45	Baik
41	Hob	2	Baik
42	Itermediate Telepone	1	Baik
43	Jam Elektroik	6	Baik
44	Jam Mekanis	16	Baik
45	Kasur Springbed	1	Baik
46	Kipas Angin	135	Baik
47	Kompore Gas	6	Baik
48	Kursi Besi Metal	263	Baik
49	Kursi Biasa	368	Baik
50	Kursi Kayu	59	Baik
51	Kursi Fiber	100	Baik
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii		Baik
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	1	Baik
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	26	Baik
55	Kursi Pejabat Eselon v	10	Baik
56	Kursi Pejabat Lainnya	74	Baik
57	Kursi Lipat	1515	Baik
58	Kursi Putar	112	Baik
59	Kursi Rapat	198	Baik
60	Kursi Tamu	36	Baik

61	Kursi Tamu Pejabat Lainnya	2	Baik
62	Kursi Tamu Diruangan Tunggu Pejabat Eselon I	5	Baik
63	Laptop	133	Baik
64	Layar Film/Proyektor	15	Baik
65	Lcd Proyektor	5	Baik
66	Lemari Besi	36	Baik
67	Lemari Arsip Dinas	9	Baik
68	Lemari Es	13	Baik
69	Lemari Kaca	17	Baik
70	Lemari Kayu	39	Baik
71	Lemari Sorok	1	Baik
72	Loudspeaker	9	Baik
73	Megaphone	3	Baik
74	Meja 1/2 Biro	173	Baik
75	Meja Kerja Besi	1	Baik
76	Meja Kerja Kayu	193	Baik
77	Meja Pegawai Non Struktural	13	Baik
78	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	18	Baik
79	Meja Pejabat Lainnya	26	Baik
80	Meja Komputer	12	Baik
81	Meja Makan Besi	1	Baik
82	Meja Panjang	8	Baik
83	Meja Rapat	99	Baik
84	Meja Resepsionist	14	Baik
85	Meja Tambahan	20	Baik
86	Meja Tamu Biasa	14	Baik
87	Mesin Hitung Elektronik	5	Baik
88	Mesin Hitung Manual	3	Baik
89	Mixcropone	10	Baik
90	Mixcropone Flor Standar	4	Baik
91	Micropone Wireles	5	Baik
92	Mimbar Podium	14	Baik
93	Modem	2	Baik
94	Monitor	13	Baik

95	Nama	1	Baik
96	Notebook	14	Baik
97	Over Headproyektor	1	Baik
98	Pc Unit	51	Baik
99	Papan Penguumuman	6	Baik
100	Papan Nama Instansi	151	Baik
101	Papan Visula Papan Nama	33	Baik
102	Peralatan Jaringan Lainnya	3	Baik
103	Printer	134	Baik
104	Radio	1	Baik
105	Rak Besi	4	Baik
106	Rak Kayu	18	Baik
107	Rice Cooker	7	Baik
108	Router	1	Baik
109	Scaner	2	Baik
110	Sepeda Motor	47	Baik
111	Serial Printer	1	Baik
112	Slide Projector	1	Baik
113	Sofa	1	Baik
114	Sound Sistem	24	Baik
115	Speaker Komputer	1	Baik
116	Mobil	1	Baik
117	Station Wangun	1	Baik
118	Stetoscop	1	Baik
119	Switcher	1	Baik
120	Tabung Gas	4	Baik
121	Tangga Alumunium	11	Baik
122	Televisi	36	Baik
123	Telex	2	Baik
124	Tempat Tidur Besi	1	Baik
125	Tempat Tidur Kayu	1	Baik
126	Tensimeter	3	Baik
127	Tiang Bendera	13	Baik
128	Timbangan Orang	2	Baik

129	Troli Car	1	Baik
130	Ukuran Tinggi Badan	1	Baik
131	Unit Power Supply	2	Baik
132	White Board	6	Baik
133	Wireless	9	Baik
134	Kitchen Set	1	Baik
135	Lambang Garuda	4	Baik
136	Lambang Instansi	1	Baik
137	Mesin Ketik Manual	3	Baik
138	Mesin Ketik Listrik	3	Baik
139	Mesin Ketik Manual Portabel	5	Baik
140	Mesin Ketik Manual Standar	2	Baik
141	Mesin Pemotong Rumput	3	Baik
142	Penyemprot Otomatis	13	Baik
143	Peta	17	Baik
144	Rak Piring Alumunium	2	Baik
145	Tape Recorder	3	Baik
146	Telephone	3	Baik
147	Telephone Hybrid	3	Baik
148	Telephone Mobile	4	Baik
149	Komputer Jaringan Lainnya	4	Baik
150	Kontainer	8	Baik
151	Mesin Penghisap Debu	2	Baik
152	Mebeler Lainnya	43	Baik
153	Mic Conferensi	1	Baik
154	Peralatan Antena Penerima Uhf	1	Baik
155	Peralatan Olahraga Lainnya	1	Baik
156	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Baik
157	Personal Komputer Lainnya	2	Baik
158	Foto Tostel	1	Baik
159	Portabel Air Conditioner	2	Baik
160	Portabel Genset	6	Baik
161	Power Amplifier	3	Baik

### **3. Kelembagaan Masyarakat.**

Kelembagaan masyarakat di Kecamatan Karanganyar ditunjukkan melalui keberadaan Koordinator Lingkungan (Korling), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Posyandu pada dua belas kelurahan. Secara keseluruhan, jumlah kelembagaan yang terdata meliputi 54 Korling, 162 RW, 571 RT, dan 96 Posyandu. Hal ini mencerminkan bahwa kelembagaan di tingkat kelurahan relatif kuat dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis masyarakat.

Dari aspek kategori kelembagaan Korling, sebagian besar kelurahan berada pada kategori 4 dan 5, yang menunjukkan kapasitas kelembagaan cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat kelurahan dengan kategori lebih rendah, seperti Kelurahan Karanganyar dengan nilai 3, sehingga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan.

Pada struktur kewilayahan, jumlah RW dan RT bervariasi. Kelurahan Bejen memiliki cakupan paling luas dengan 18 RW dan 82 RT, sedangkan Karanganyar memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 10 RW dan 35 RT. Variasi ini menunjukkan perbedaan jumlah penduduk dan kepadatan wilayah antar kelurahan.

Keberadaan Posyandu sebagai kelembagaan layanan kesehatan dasar juga menunjukkan distribusi yang belum merata. Tegalgede memiliki jumlah Posyandu tertinggi (16 Posyandu), sedangkan Karanganyar dan Gayamdompo hanya memiliki 5 Posyandu. Rasio jumlah Posyandu terhadap RT di Karanganyar adalah 1 Posyandu untuk 7 RT, yang menunjukkan beban pelayanan kesehatan masyarakat relatif berat dibanding kelurahan lain, misalnya Tegalgede dengan rasio lebih ideal, yaitu 1 Posyandu untuk 3 RT.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan di Kecamatan Karanganyar secara umum memiliki basis yang kuat. Akan tetapi, masih diperlukan upaya penguatan, terutama pada kelurahan yang memiliki kategori kelembagaan rendah dan rasio kelembagaan layanan kesehatan yang belum seimbang. Optimalisasi distribusi Posyandu serta peningkatan kapasitas kader kelembagaan menjadi penting agar peran kelembagaan masyarakat dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan wilayah.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Kelembagaan di Kecamatan Karanganyar Tahun 2025**  
*Sumber : Data Kepegawaian Kec. Karanganyar (2025)*

No	Kelurahan	Kategori			
		Korling	RW	RT	Posyandu
1	Karanganyar	3	10	35	5
2	Delingan	4	13	36	8
3	Cangkalan	5	14	43	6
4	Jungke	4	13	44	6
5	Gayamdompo	5	11	42	5
6	Lalung	5	15	61	9
7	Popongan	4	14	49	11
8	Gedong	5	11	37	6
9	Jantiharjo	5	15	49	7
10	Bejen	5	18	82	12
11	Tegalgede	5	16	57	16
12	Bolong	4	12	36	5
	Jumlah	54	162	571	96

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Karanganyar mencapai 88.719 jiwa, terdiri dari 43.948 jiwa laki-laki dan 44.771 jiwa perempuan. Secara keseluruhan, terdapat keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, meskipun jumlah perempuan lebih banyak sebanyak 823 jiwa. Kondisi ini menunjukkan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang, sehingga potensi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat terdistribusi secara merata.

Jika ditinjau berdasarkan desa/kelurahan, jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Bejen dengan 12.239 jiwa, disusul oleh Kelurahan Tegalgede sebanyak 10.549 jiwa, serta Kelurahan Lalung sebanyak 9.425 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terkecil terdapat di Kelurahan Bolong dengan 4.205 jiwa dan Kelurahan Karanganyar dengan 4.814 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepadatan penduduk antarwilayah, di mana beberapa kelurahan menampung populasi hingga tiga kali lipat lebih besar dibanding kelurahan lainnya.

Dari sisi distribusi gender, sebagian besar kelurahan memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Namun demikian, terdapat variasi kecil seperti di Kelurahan Bejen yang menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak (6.224 jiwa) dibanding laki-laki (6.015 jiwa), sementara di Kelurahan Tegalgede jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding perempuan.

Secara demografis, kondisi Kecamatan Karanganyar menggambarkan:

1. Keseimbangan gender yang mendukung peran aktif laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan.
2. Konsentrasi penduduk pada kelurahan tertentu (Bejen, Tegalgede, Lalung) yang berimplikasi pada kebutuhan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang lebih besar.
3. Wilayah berpenduduk sedikit (Bolong, Karanganyar, Gayamdompo) yang memerlukan strategi pemerataan pembangunan agar tidak tertinggal dibanding wilayah yang lebih padat.

Pada sasaran peningkatan kualitas tata laksana pemerintahan, indikator Nilai SAKIP menunjukkan perkembangan yang cukup konsisten meskipun belum mencapai target dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar 72 dengan realisasi 70,39 sehingga capaian tercatat sebesar 97,76 persen. Pada tahun 2022, target sebesar 69 berhasil terlampaui dengan realisasi 69,80, sehingga meskipun capaian persentase tidak tercantum, dapat dinyatakan bahwa target terpenuhi. Selanjutnya, pada tahun 2023 target ditetapkan sebesar 71 dengan realisasi 70,05 sehingga capaian berada pada angka 98,66 persen. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024, di mana target meningkat menjadi 72 namun realisasi hanya mencapai 70,65 dengan capaian sebesar 98,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun skor kinerja SAKIP relatif stabil, peningkatan target yang progresif belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan signifikan pada realisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengelolaan internal, khususnya dalam pemenuhan indikator kinerja dan perbaikan aspek evaluasi, karena masih terdapat indikator penting SAKIP yang belum teridentifikasi secara optimal.

Sementara itu, pada sasaran peningkatan kualitas pembangunan, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2021, target IKM sebesar 72 berhasil dilampaui dengan realisasi 85,02 atau capaian 118,09 persen. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan target 74 dan realisasi 85,07, menghasilkan capaian sebesar 114,95 persen. Pada tahun 2023, target meningkat menjadi 75 dengan realisasi 87,95 sehingga capaian mencapai 117,27 persen. Meski pada tahun 2024 realisasi sedikit menurun menjadi 83,20 dari target 75, capaian tetap tinggi yakni sebesar 110,93 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik konsisten berada di atas target, mencerminkan efektivitas strategi pembangunan yang dijalankan serta menjadi dasar kuat untuk pengembangan kebijakan lanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Penguatan manajemen kinerja internal melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja agar target *Nilai SAKIP* dapat tercapai secara optimal.
2. Penyempurnaan indikator kinerja dengan memastikan seluruh aspek penting dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah teridentifikasi dan terukur.

3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam penyusunan dan pelaksanaan program, termasuk pelatihan terkait tata kelola berbasis hasil (*result-based management*).
4. Penetapan target yang lebih ambisius namun realistis pada Indeks Kepuasan Masyarakat, mengingat capaian riil selama empat tahun terakhir konsisten berada di atas target.
5. Pemanfaatan umpan balik masyarakat secara lebih sistematis untuk memperkuat perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja tata laksana pemerintahan dapat lebih optimal, sekaligus menjaga tren positif peningkatan kualitas pembangunan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berikut ini capaian kinerja kecamatan Karanganyar:

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Indikator Utama Kecamatan Karanganyar**  
**Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP	Nilai	72	70,39	97,76	69	69,80	Na	71	70,05	98,66	72	70,65	98,13
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	72	85,02	118,09	74	85,07	114,95	75	87,95	117,27	75	83,2	110,93

Secara keseluruhan, capaian program perangkat daerah menunjukkan tren yang positif dengan sebagian besar program mampu mendekati atau bahkan melampaui target Renstra. Beberapa catatan penting mencakup perlunya peningkatan konsistensi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, perbaikan pelaporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta kelengkapan data pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, fokus penguatan pada aspek manajerial, koordinasi lintas unit, serta sistem pelaporan akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di periode berikutnya.

**Tabel 2.7**  
**Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Karanganyar**  
**Kabupaten Karanganyar Tahun 2021- 2024**

No.	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke				Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun ke				Persentase Capaian pada Tahun ke (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	94,61	91,23	95	94,89	94,61	91,23	95	94,89
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	99,38	99,52	99,52	100	99,38	99,52	99,52	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	99,69	100	100	100	99,69
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	-	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	98,82	97,51	97,51	100	98,82	98,82	97,51	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	NA	99,96	99,96	100	NA	99,96	100	100	NA

Berdasarkan data capaian anggaran Kecamatan Karanganyar selama periode 2021 hingga 2024, terlihat dinamika pelaksanaan program yang mencerminkan efektivitas serta konsistensi pengelolaan keuangan daerah. Berikut uraian per program:

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Pada tahun 2021, program ini dialokasikan sebesar Rp13.858.238,90 dengan realisasi Rp13.111.832,20 atau 94,61 persen. Tahun 2022 target meningkat menjadi Rp15.707.928,80 dengan realisasi hampir sama, yakni Rp15.707.929, walaupun capaian menurun menjadi 91,23 persen. Tahun 2023 target meningkat signifikan menjadi Rp19.189.271,00 dengan realisasi Rp18.179.309,40 dan capaian 95 persen. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan alokasi yang sangat tinggi mencapai Rp3.008.675.292 dengan realisasi Rp2.855.101.255 dan capaian 94,89 persen. Pola ini menunjukkan adanya peningkatan anggaran yang cukup drastis di tahun 2024, disertai kemampuan realisasi yang masih tinggi sehingga mengindikasikan kapasitas kelembagaan dalam menyerap anggaran tetap terjaga.

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.** Program ini memperlihatkan tren capaian yang konsisten tinggi. Pada tahun 2021, target Rp64.000 dengan realisasi Rp63.600 (99,38 persen). Tahun 2022 target Rp118.100.000 direalisasikan penuh (100 persen). Tahun 2023 alokasi meningkat drastis menjadi Rp157.147.700 dengan realisasi Rp156.389.753 (99,52 persen). Tahun 2024 anggaran ditetapkan Rp110.199.500 dan kembali terealisasi penuh (100 persen). Konsistensi capaian mendekati atau mencapai 100 persen mencerminkan pengelolaan yang efisien dan efektif, sekaligus menunjukkan bahwa program ini memiliki prioritas tinggi dalam mendukung pelayanan publik.

**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.** Pada tahun 2021, program ini mendapat alokasi Rp12.151.429 dan direalisasikan penuh (100 persen). Tahun 2022 alokasi menurun drastis menjadi Rp4.732.000, namun kembali terealisasi penuh. Tahun 2023 terjadi lonjakan besar dengan target Rp15.742.335,70 dan realisasi sepenuhnya. Tahun 2024 target kembali meningkat signifikan menjadi Rp16.344.650.100 dengan realisasi Rp16.294.650.100 atau capaian 99,69 persen. Data ini menunjukkan bahwa program ini memiliki fleksibilitas tinggi, dengan kemampuan menyerap anggaran secara optimal meskipun terjadi fluktuasi alokasi yang sangat besar dari tahun ke tahun.

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
Program ini pada tahun 2021 mendapat alokasi Rp625.000 dengan realisasi Rp600.909,50 (96,15 persen). Tahun 2022 target sebesar Rp69.820.000 dan terealisasi penuh dengan capaian sama (96,15 persen). Tahun 2023 tidak tersedia data alokasi maupun realisasi sehingga evaluasi tidak dapat dilakukan. Tahun 2024 program ini kembali mendapat alokasi Rp15.000.500 dan berhasil direalisasikan penuh (100 persen). Secara umum, program ini menunjukkan capaian yang konsisten baik, meskipun ketersediaan data tahun 2023 menjadi kelemahan dalam penilaian kesinambungan program.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2021 program ini mendapat alokasi Rp312.291,80 dengan realisasi Rp308.607,80 (98,82 persen). Tahun 2022 target menurun menjadi Rp12.460.000 dengan realisasi Rp12.461.000, menghasilkan capaian tetap 98,82 persen. Tahun 2023 target meningkat ke Rp397.848 dan terealisasi Rp387.688,60 (97,51 persen). Tahun 2024 terjadi lonjakan besar dengan target Rp2.285.511.900 dan realisasi penuh sebesar angka yang sama (100 persen). Pola ini memperlihatkan bahwa meskipun terjadi lonjakan alokasi, kapasitas serapan tetap terjaga bahkan meningkat, yang menjadi indikator positif dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada tahun 2021, alokasi sebesar Rp2.802.905,30 dengan realisasi Rp2.801.745,30 (99,96 persen). Tahun 2022 target Rp15.000.000 direalisasikan penuh. Tahun 2023 target Rp2.973.967 juga terealisasi penuh (100 persen). Tahun 2024 tidak tersedia data target maupun realisasi sehingga evaluasi tidak dapat dilakukan. Secara umum, program ini menunjukkan konsistensi capaian yang sangat tinggi, meskipun pada tahun terakhir belum dapat dinilai.

Analisis pendanaan per program menunjukkan bahwa Kecamatan Karanganyar secara umum berhasil menjaga kinerja penyerapan anggaran dengan capaian di atas 90 persen di hampir semua program. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menonjol dengan capaian 100 persen secara konsisten pada beberapa tahun. Lonjakan alokasi pada tahun 2024 di beberapa program, terutama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, tetap mampu diimbangi dengan serapan yang tinggi. Kendati demikian, ketiadaan data pada beberapa program di tahun 2023 dan 2024 menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki, karena dapat mengurangi akuntabilitas dan kontinuitas evaluasi. Dengan demikian, penguatan mekanisme pelaporan dan konsistensi penyediaan data menjadi aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran ke depan.

**Tabel 2.7**  
**Capaian Anggaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 - 2024**

No.	Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.858.238,9	13.111.832,2	94,61	15.707.928,8	15.707.929	91,23	19.189.271	181.793.094	95	3.008.675.292	2.855.101.255	94,89
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	64.000	63.600	99,38	1.181.01	118.100	100	157.147.700	156.389.753	99,52	110.199.500	110.199.500	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12.151.429	12.151.429	100	4.732	4.733	100	15.742.33.57	15.742.33.57	100	16.344.650.100	16.294.650.100	99,69
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	625.000	600.909,5	96,15	69.820	69.820	96,15	Na	Na	Na	15.000.500	15.000.500	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	312.291,8	308.607,8	98,82	12.460	12.461	98,82	397.848	387.688,6	97,51	2.285.511.900	2.285.511.900	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.802.905,3-	2.801.745,3	99,96	15.000	15.000	99,96	2.973.967	2.973.967	100	Na	Na	Na

Berdasarkan data capaian kinerja perangkat daerah tahun 2021–2024, dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Target kinerja ditetapkan konsisten sebesar 100 persen setiap tahun. Realisasi menunjukkan capaian relatif stabil, yaitu 94,61 persen (2021), 91,23 persen (2022), 95 persen (2023), dan 94,89 persen (2024). Walaupun mendekati target, capaian belum pernah mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan masih adanya faktor teknis dan administratif yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih optimal.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Capaian kinerja program ini tergolong tinggi dan konsisten, dengan realisasi 99,38 persen pada 2021, meningkat menjadi 99,52 persen pada 2022–2023, dan mencapai 100 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas program yang semakin baik serta perbaikan dalam aspek pelayanan publik yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Realisasi program menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian 100 persen berhasil dipertahankan selama 2021–2023, sementara pada 2024 sedikit menurun menjadi 99,69 persen. Secara umum, program ini dinilai efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta penguatan kapasitas desa dan kelurahan.

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pada tahun 2021, capaian kinerja tercatat 100 persen, namun pada 2022–2023 tidak terdapat data realisasi. Tahun 2024 kembali mencatat capaian penuh sebesar 100 persen. Ketiadaan data pada dua tahun berturut-turut menjadi catatan penting untuk perbaikan sistem pelaporan dan dokumentasi kinerja.

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Realisasi capaian kinerja berada pada kisaran 97–99 persen. Tahun 2021 mencatat capaian 98,82 persen, menurun sedikit pada 2022–2023 (97,51 persen), dan meningkat kembali menjadi 100 persen pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan yang signifikan pada akhir periode Renstra, sehingga target dapat tercapai penuh.

6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kinerja program ini relatif baik dengan capaian 99,96 persen pada 2021 dan 2022, serta mencapai 100 persen pada 2023. Pada 2024 tidak terdapat data capaian sehingga belum dapat dilakukan evaluasi. Namun demikian, tren sebelumnya menunjukkan program ini berjalan efektif dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

##### **1. Masyarakat Umum**

Masyarakat umum merupakan kelompok sasaran utama dari layanan kecamatan. Mereka mencakup seluruh warga yang berdomisili atau memiliki kepentingan administratif di wilayah kecamatan, termasuk penduduk tetap, pendatang, dan kelompok rentan. Kecamatan memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat umum, antara lain pengantar administrasi kependudukan (seperti KTP, KK, akta kelahiran, surat pindah), surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, dan surat pengantar lainnya. Selain itu, kecamatan juga menjadi tempat masyarakat mengajukan pengaduan, konsultasi, serta mendapatkan informasi terkait pelayanan publik. Peran kecamatan adalah memudahkan akses warga terhadap layanan pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan berlangsung cepat, akuntabel, dan transparan.

##### **2. Pemerintah Kelurahan**

Pemerintah kelurahan, termasuk, lurah, perangkat perangkat kelurahan dan LPMK, merupakan kelompok sasaran penting yang dibina oleh kecamatan. Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Layanan yang diberikan meliputi fasilitasi sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan juga membantu menyelesaikan permasalahan antar warga atau antar lembaga kelurahan serta memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan.

##### **3. Lembaga Kemasyarakatan**

Lembaga kemasyarakatan meliputi organisasi-organisasi lokal seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, RT/RW, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), kelompok tani, kelompok perempuan, Linmas dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kecamatan memiliki tugas untuk membina dan memfasilitasi kegiatan lembaga-lembaga ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dukungan yang diberikan dapat berupa pelatihan kapasitas kelembagaan, penyediaan informasi program pemerintah, fasilitasi kegiatan gotong royong, dan penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat. Peran lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menjembatani pemerintah dengan warga, sehingga kecamatan berkewajiban memperkuat peran serta mereka melalui pendekatan partisipatif dan inklusif.

#### **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

##### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

1. **Belum optimalnya kinerja penunjang pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada masing-masing unit kerja di kecamatan.** Hal ini dikarenakan belum optimalnya Pemerataan beban kerja, ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan, kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan, ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
2. **Belum optimalnya penerapan kepuasan pelayanan publik** Kecamatan belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja sesuai dengan standarnya, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal belum optimal.
3. **Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat.** Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata
4. **Wilayah yang harus dilayani cukup luas, dihadapkan dengan persoalan sarana prasarana kerja yang belum memadai.**  
Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan medan geografis yang bervariasi membutuhkan mobilitas dan jangkauan layanan yang tinggi. Namun, fasilitas kerja seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi, dan sarana komunikasi masih terbatas dan kurang memadai untuk mendukung pelayanan yang optimal.
5. **Belum optimalnya ketersediaan dukungan data penerima pelayanan kesejahteraan sosial .** Banyaknya Sumber Data pelayanan kesejahteraan sosial yang menyebabkan data berbeda. Aduan masyarakat belum semua diselesaikan dengan optimal.
6. **Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan .** Pembangunan kelurahan belum selaras dengan target pembangunan daerah . Belum optimalnya dukungan kelembagaan di tingkat kelurahan dalam mendukung program prioritas daerah
7. **Belum optimalnya fasilitasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja kelurahan.** Sistem pelaporan keuangan dan kinerja kelurahan belum sesuai waktu yang ditentukan. Belum meratanya kapasitas Sumber daya administrasi perangkat kelurahan

**Tabel. 2.2.1**  
**Tabel permasalahan dan Akar Masalah**

**2.2.2. Isu Strategis**

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum optimalnya kinerja penunjang pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada masing-masing unit kerja di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan</li> <li>b. Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan</li> <li>c. Ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan</li> <li>d. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik</li> <li>e. Belum optimalnya Pemerataan beban kerja</li> </ul>
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan kelurahan	Belum optimalnya penerapan <i>kepuasan pelayanan publik</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan standar pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal</li> <li>b. dukungan sarpras pelayanan yang bersifat kemitraan berada diluar jangkauan kecamatan</li> </ul>
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM</li> <li>b. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan</li> <li>c. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata</li> </ul>
		Belum optimalnya ketersediaan dukungan data penerima pelayanan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banyaknya Sumber Data pelayanan kesejahteraan sosial yang menyebabkan data berbeda</li> <li>b. Aduan masyarakat belum semua diselesaikan dengan optimal</li> </ul>
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan kelurahan belum selaras dengan target pembangunan daerah</li> <li>b. Belum optimalnya dukungan kelembagaan di tingkat kelurahan dalam mendukung program prioritas daerah</li> </ul>
		Belum optimalnya fasilitasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem pelaporan keuangan dan kinerja kelurahan belum sesuai waktu yang ditentukan</li> <li>b. Belum meratanya kapasitas Sumber daya administrasi perangkat kelurahan</li> </ul>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka, disimpulkan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan sebagai berikut :**Belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.** Hal ini disebabkan oleh:

1. kurangnya kualitas dan kualitas SDM dalam penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi urusan pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kerja pegawai kecamatan. Fasilitas seperti komputer, kendaraan dinas, jaringan internet, dan ruang pelayanan yang tersedia belum digunakan secara efektif. Ada yang belum difungsikan dengan baik atau tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan, sehingga kinerja pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal.

**Tabel. 2.2.2**  
**Tabel Isu Strategis Kecamatan Karanganyar**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
a. Kedekatan Hubungan Sosial antara Kecamatan, Kelurahan, dan Masyarakat b. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Mulai Berkembang c. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Reformasi Birokrasi d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur e. Penerapan Sistem Pengelolaan Kinerja yang Lebih Efektif f. Kecamatan Karanganyar merupakan kecamatan perkotaan yang memiliki UMKM yang bervariasi, penataan infrastruktur perkotaan yang tertata g. Memiliki kelurahan yang menjadi potensi tempat olahraga paralimpic berstandar nasional h. Setiap kelurahan memiliki binaan anak stunting, GNOTA, i. Dimilikinya potensi wisata di kelurahan Delingan j. Kelurahan Jantiharjo sebagai kelurahan yang mampu mengelola sampah dan sebagai pusat studi tiru	a. Belum optimalnya kinerja penunjang pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada masing-masing unit kerja di kecamatan a. Belum optimalnya penerapan <i>service excellence</i> a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat a. Belum optimalnya ketersediaan dukungan data penerima pelayanan kesejahteraan sosial a. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan a. Belum optimalnya fasilitasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja kelurahan	Daya Saing ekonomi, Kemiskinan	Tata Kelola yang belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	<b>Belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Perencanaan pembangunan kewilayahan dapat digambarkan dari dokumen perencanaan kecamatan. Tujuan pembangunan lima tahun ke depan untuk Kecamatan Karanganyar dalam rangka mencapai Visi RPJMD 2025-2029 yaitu khususnya Visi "**“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpuri yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera**" sesuai Misi ke-4 Bupati "Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik" ke dalam program dan kegiatan Kecamatan Karanganyar.

Merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD, disampaikan bahwa tujuan perangkat daerah disusun dengan memperhatikan NSPK kementerian dan tujuan serta sasaran daerah. Tujuan daerah yang diacu dalam penyusunan Renstra adalah Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi dan Sasaran Daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik dengan indikator Indek Pelayanan Publik. Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah maka tujuan renstra Kecamatan Karanganyar adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan**. Dalam rangka mencapai tujuan diatas sasaran yang dirumuskan adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Peerangkat Daerah** dengan indikator **Nilai IKM**.

Berikut ini tabel tujuan dan sasaran Kecamatan Karanganyar:

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar**  
**Tahun 2025-2029**

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Misi 4: Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik Tj 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran 1: Meningkatnya Transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	71,42	80,3	85,71	89,28	92,85	96,42	100
			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	83,2	85	85,75	86	86,50	86,75	87

*Sumber : Hasil Analisis Data Kecamatan Karanganyar*

### 3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dalam mencapai sasaran meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang disediakan adalah sarana dan prasarana yang responsif terhadap perempuan, ramah anak dan difabel. Peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Kecamatan. Kompetensi SDM kecamatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. SDM kecamatan harus memiliki kompetensi yang harmoni. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis
3. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kelurahan. Kelurahan sebagai pemerintahan terkecil yang dekat dengan masyarakat harus memiliki kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Peningkatan kualitas infrastruktur kelurahan dan kualitas kelompok masyarakat dalam hal ini PKK, LPMK, Karangtaruna, Posyandu, Linmas, RT RW. Peningkatan kualitas koordinasi dengan lintas sektor (puskesmas, KUA, DisdakKBPPA, Dinas pertanian) dalam rangka pemberdayaan masyarakat menyelesaikan isu strategis daerah
4. Peningkatan kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertikal (kepolisian dan TNI) dan Satpol PP dalam mendorong keamanan dan ketertiban. Peningkatan keamanan wilayah kelurahan dan kecamatan melalui penguatan Linmas dan keamanan RW dan RT.
5. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara dengan melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan Bersama Kesbangpol dan meningkatkan forum lintas agama dalam rangka mengurangi potensi konflik. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi forum pimpinan kecamatan.

Dalam rangka mencapai strategi diatas berikut ini prioritas pembangunan kecamatan setiap tahunnya:



Prioritas pembangunan tahun 2026: Peningkatan tata kelola Kecamatan dan daya saing SDM Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan dan kelurahan
- b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
- c. Peningkatan kompetensi SDM Kecamatan dan Kelurahan
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan dan kelurahan

Prioritas pembangunan tahun 2027: Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat yang mendukung daya saing daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kelembagaan kecamatan dan kelurahan. Peningkatan dan pemberdayaan peran PKK, LPMK dan Karangtaruna dalam mencapai program prioritas daerah.
- b. Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam mendorong daya saing daerah. Penguatan koperasi merah putih dan UMKM melalui koordinasi dengan dinas terkait
- c. Peningkatan peran RW dan RT dalam mendorong kualitas lingkungan

Prioritas pembangunan tahun 2028: Peningkatan kualitas infrastruktur dan keamanan ketertiban masyarakat yang mendukung pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan kelurahan dan kecamatan .
- b. Peningkatan kualitas linmas dalam mendorong keamanan dan ketertiban wilayah
- c. Peningkatan peran RW dan RT dalam mendorong kualitas keamanan dan ketertiban wilayah
- d. Peningkatan koordinasi dengan kepolisian TNI dan satpol PP
- e. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umam beragama

Prioritas pembangunan tahun 2029: Perwujudan Kualitas Pelayanan Publik yang nyaman dan inklusif dalam mencapai Karanganyar Baru adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan pelayanan publik yang ramah dan nyaman
- b. Penguatan pelayanan publik berbasis teknologi
- c. Pemberdayaan masyarakat yang inklusif
- d. Perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat
- e. Penguatan peran RW dan RT dalam mendorong kualitas keamanan dan ketertiban wilayah

Prioritas pembangunan tahun 2030: Perwujudan tata kelola pemerintahan Kecamatan BERDAYA dan INKLUSIF dalam Karanganyar Baru adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan publik ramah, mudah dan inklusif berbasis teknologi
- b. Perwujudan keamanan dan ketertiban wilayah dalam karanganyar baru
- c. Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan yang berdaya

Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Karangayar dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman,

cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat difokuskan pada :

1. Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan

Arah Kebijakan :

- a. Penyesuaian SOP pelayanan umum dan pemerintahan kelurahan
  - b. Pelatihan dasar aparatur.
  - c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana.
  - d. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT.
2. Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan

Arah Kebijakan :

- a. Implementasi layanan publik berbasis digital.
  - b. Pengadaan sarana prasarana berbasis TI.
  - c. Integrasi pelayanan kecamatan dan kelurahan.
  - d. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi
3. Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

Arah Kebijakan :

- a. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja.
  - b. Peningkatan kualitas evaluasi periodik kinerja pelayanan.
  - c. Penguatan pembinaan pemerintahan kelurahan.
  - d. Penyempurnaan laporan kinerja.
4. Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan

Arah Kebijakan :

- a. Standarisasi layanan prima ramah kelompok rentan.
  - b. Integrasi data administrasi secara penuh.
  - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan.
5. Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital

Arah kebijakan:

- a. Pelayanan publik dan administrasi 100% berbasis digital.
- b. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi.
- c. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kesesuaian arah kebijakan RPJMD dengan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029**

Misi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat;	1. Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Arah Kebijakan : a. Penyesuaian SOP pelayanan umum dan pemerintahan kelurahan b. Pelatihan dasar aparatur. c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana. d. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT.  2. Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan a. Arah Kebijakan : b. Implementasi layanan publik berbasis

Misi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		<p>digital.</p> <p>c. Pengadaan sarana prasarana berbasis TI.</p> <p>d. Integrasi pelayanan kecamatan dan kelurahan.</p> <p>e. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi</p> <p>3. Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Arah Kebijakan :</p> <p>a. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja.</p> <p>b. Peningkatan kualitas evaluasi periodik kinerja pelayanan.</p> <p>c. Penguatan pembinaan pemerintahan kelurahan.</p> <p>d. Penyempurnaan laporan kinerja.</p> <p>4. Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan Arah Kebijakan :</p> <p>a. Standarisasi layanan prima ramah kelompok rentan.</p> <p>b. Integrasi data administrasi secara penuh.</p> <p>c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan.</p> <p>5. Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital Arah kebijakan:</p> <p>a. Pelayanan publik dan administrasi 100% berbasis digital.</p> <p>b. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi.</p> <p>c. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.</p>

Adapun keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 akan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	<p>1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang disediakan adalah sarana dan prasarana yang responsif terhadap perempuan, ramah anak dan difabel. Peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi.</p> <p>2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Kecamatan. Kompetensi SDM kecamatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. SDM kecamatan harus memiliki kompetensi yang harmoni. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan pelatihan</p>	<p>a. Implementasi layanan publik berbasis digital</p> <p>b. Pengadaan sarana prasarana berbasis TI</p> <p>c. Integrasi pelayanan kecamatan dan kelurahan</p> <p>d. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi</p>

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(5)
		<p>dan bimbingan teknis</p> <p>3. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kelurahan. Kelurahan sebagai pemerintahan terkecil yang dekat dengan masyarakat harus memiliki kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Peningkatan kualitas infrastruktur kelurahan dan kualitas kelompok masyarakat dalam hal ini PKK, LPMK, Karangtaruna, Posyandu, Linmas, RT RW. Peningkatan kualitas koordinasi dengan lintas sektor (puskesmas, KUA, DisdakKBPPA, Dinas pertanian) dalam rangka pemberdayaan masyarakat menyelesaikan isu strategis daerah</p> <p>4. Peningkatan kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertikal (kepolisian dan TNI) dan Satpol PP dalam mendorong keamanan dan ketertiban. Peningkatan keamanan wilayah kelurahan dan kecamatan melalui penguatan Linmas dan keamanan RW dan RT.</p> <p>5. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara dengan melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan Bersama Kesbangpol dan meningkatkan forum lintas agama dalam rangka mengurangi potensi konflik. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi forum pimpinan kecamatan.</p>	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	<p>Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan</p> <p>Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan Arah Kebijakan</p>	<p>a. Penyesuaian SOP pelayanan umum dan pemerintahan kelurahan</p> <p>a. Pelatihan dasar aparatur</p> <p>b. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana</p> <p>c. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT</p> <p>a. Implementasi layanan publik berbasis digital.</p> <p>b. Pengadaan sarana</p>

<b>Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra</b>
(1)	(2)	(3)	(5)
			prasarana berbasis TI. c. Integrasi pelayanan kecamatan dan kelurahan. d. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi
		Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	a. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja b. Peningkatan kualitas evaluasi periodik kinerja pelayanan c. Penguatan pembinaan pemerintahan kelurahan d. Penyempurnaan laporan kinerja
		Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan	a. Standarisasi layanan prima ramah kelompok rentan. b. Integrasi data administrasi secara penuh. c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan.
		Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital	a. Pelayanan publik dan administrasi 100% berbasis digital. b. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi. c. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN KECAMATAN KARANGANYAR**

**4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan sub kegiatan
    - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    - 4) Evaluasi Kelurahan
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan:
    - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik yang optimal. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut;
    - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
- 2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
  - 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota
- Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menangani tentang kebutuhan rutin untuk mendukung kelancaran administrasi didalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mencapai program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam program ini sebagai berikut:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pengadaan Mebel
    - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pemeliharaan Mebel
    - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Tabel 4.1 Tujuan Sasaran, Outcome, Output, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya pembinaan Lembaga masyarakat desa	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan
			Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
			Terselenggaranya Lembaga	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan

			Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan
		Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya kualitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas

			Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Tersusunnya Laporan Keuangan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Tersusunnya administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Tersediannya Pakaian dinas	7.01.01.2.05 .0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Tersediannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 .0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Tersediaanya mebel	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.06.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.06.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.06.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Layanan Penunjang	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

			Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 .0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.08 .0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berikut ini rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif  
**Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif**

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<b>Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan</b>	%	71,42	80,3		85,71		89,28		92,85		96,42		100,00		
Meningkatnya Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Indeks	83,2	85		85,75		86		86,5		86,75		87		
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	6.706.825	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	kegiatan	13	13	6.706.825	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	892.400											
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	13	5.814.425	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>13.859.225.070</b>	<b>95</b>	<b>13.799.000.000</b>	<b>96</b>	<b>13.900.273.600</b>	<b>97</b>	<b>13.900.273.600</b>	<b>98</b>	<b>13.900.273.600</b>	<b>98</b>	<b>13.900.273.600</b>	
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	lembaga	7	7	110.562.700											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	Laporan	12	12	99.562.700											

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<b>Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11.000.000</b>										
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	lembaga	13	13	13.672.532.570	13	13.099.000.000	13	13.100.273.600	13	13.100.273.600	13	13.100.273.600	13	13.100.273.600
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga Kema Syaraka tan	13	13	181.110.520	13	1.077.000.000	13	1.078.273.600	13	1.078.273.600	13	1.078.273.600	13	1.078.273.600
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	13	13	12.545.000.000	13	6.000.000.000	13	6.000.000.000	13	6.000.000.000	13	6.000.000.000	13	6.000.000.000
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	55	72	944.442.050	55	5.972.000.000	55	5.972.000.000	55	5.972.000.000	55	5.972.000.000	55	5.972.000.000
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	13	13	2.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga masyarakat kecamatan yang dibina	lembaga	7	7	76.129.800	7	700.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	7	7	76.129.800	7	700.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000
<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	2.635.000	100	303.530.000	100	303.530.000	100	303.530.000	100	303.530.000	100	303.530.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan/kelurahan	13	13	2.635.000	13	303.530.000	13	303.530.000	13	303.530.000	13	303.530.000	13	303.530.000
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	13	2.635.000	13	303.530.000	13	303.530.000	13	303.530.000	13	303.530.000	13	303.530.000

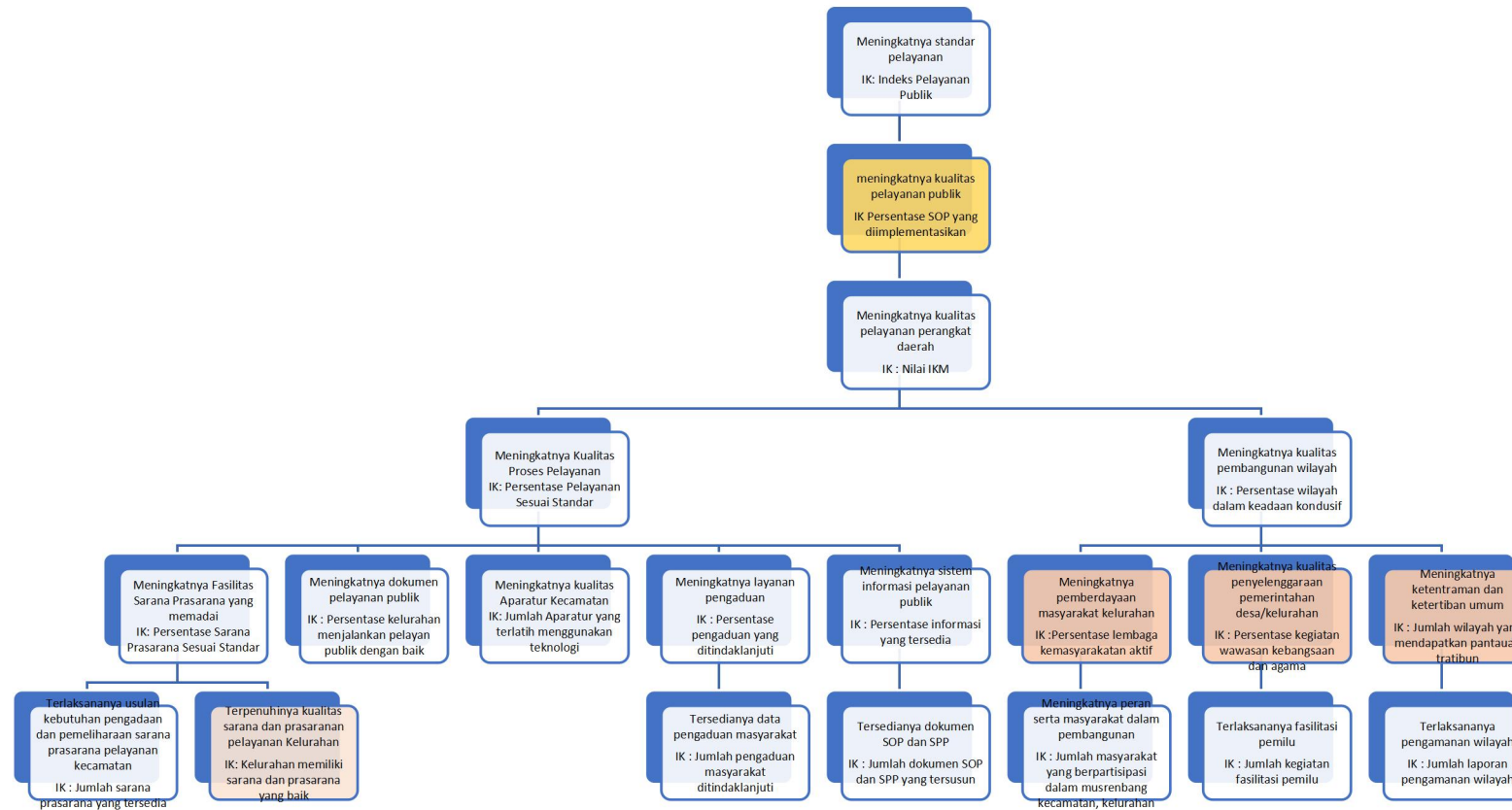
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.026.963.750</b>	<b>95</b>	<b>671.600.000</b>	<b>96</b>	<b>771.600.000</b>	<b>97</b>	<b>771.600.000</b>	<b>98</b>	<b>771.600.000</b>	<b>98</b>	<b>771.600.000</b>	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	kegiatan	4	4	3.026.963.750	4	671.600.000	4	771.600.000	4	771.600.000	4	771.600.000	4	771.600.000	
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	250	250	242.525.500	300	100.000.000	300	150.000.000	300	150.000.000	300	150.000.000	300	150.000.000	
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	Na	40	319.749.300											
7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-Jumlah orang yang mengikutoi Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	50	60	216.744.300											
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	60	60	19.560.000	60	150.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	
7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	3	2.206.784.650	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	

7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	21.600.000	12	21.600.000	12	21.600.000	12	21.600.000	12	21.600.000	12	21.600.000
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP</b>		<b>70,65</b>	<b>70,67</b>	<b>16.429.466.244</b>	<b>70,95</b>	<b>13.792.648.789</b>	<b>71</b>	<b>13.888.386.189</b>	<b>71,20</b>	<b>13.888.386.189</b>	<b>71,30</b>	<b>13.888.386.189</b>	<b>71,40</b>	<b>13.888.386.189</b>
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	100	22.917.550	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	14.307.550	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	8.610.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	%	100	100	12.624.677.984	100	10.029.648.789	100	10.037.386.189	100	10.037.386.189	100	10.037.386.189	100	10.037.386.189
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	85	95	12.624.677.984	93	10.029.648.789	93	10.037.386.189	93	10.037.386.189	93	10.037.386.189	93	10.037.386.189
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	%	100	100	77.998.000	100	93.000.000	100	108.000.000	100	108.000.000	100	108.000.000	100	108.000.000
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	2	63.322.400	2	80.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	9.675.000	1	13.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	384.980.610	100	460.000.000	100	513.000.000	100	513.000.000	100	513.000.000	100	513.000.000
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	41.550.400	13	60.000.000	13	70.000.000	13	70.000.000	13	70.000.000	13	70.000.000
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	128.098.190	13	120.000.000	13	120.000.000	13	120.000.000	13	120.000.000	13	120.000.000
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13	13	26.108.400	13	40.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000

7.01.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	19.235.000	13	35.000.000	13	40.000.000	13	40.000.000	13	40.000.000	13	40.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	13	70.407.870	13	80.000.000	13	90.000.000	13	90.000.000	13	90.000.000	13	90.000.000	
7.01.01.2.06.0006	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	13	13	12.540.000	13	15.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	
7.01.01.2.06.0007	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	1	3.000.000											
7.01.01.2.06.0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	13	13	78.459.500	13	100.000.000	13	110.000.000	13	110.000.000	13	110.000.000	13	110.000.000	
7.01.01.2.06.0010	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13	13	5.581.250	13	10.000.000	13	13.000.000	13	13.000.000	13	13.000.000	13	13.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100	100	798.173.300	100	590.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Na	Na		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Na	4	72.050.000	Na	90.000.000	9	90.000.000	9	90.000.000	9	90.000.000	9	90.000.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	6	275.192.000	13	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	350.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
7.01.01.2.06.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100.931.300	1	165.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	
7.01.01.2.06.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1		1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesrentaase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2.096.026.750	100	2.100.000.000		2.115.000.000		2.115.000.000		2.115.000.000		2.115.000.000	
7.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13	13	766.069.200	13	800.000.000	13	800.000.000	13	800.000.000	13	800.000.000	13	800.000.000	
7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13	13	318.400.000	13	290.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	
7.01.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	13	13	10.940.000	13	15.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	

	Disediakan															
7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	1.000.616.750	13	995.000.000	13	995.000.000	13	995.000.000	13	995.000.000	13	995.000.000	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpeliharaan	%	100	100	424.692.050	100	490.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	48	145.951.650	48	160.000.000	40	170.000.000	40	170.000.000	40	170.000.000	40	170.000.000	
7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Na	Na		13	15.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	13	20.000.000	
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	13	88.612.500	13	90.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	13	130.668.200	13	150.000.000	13	150.000.000	13	150.000.000	13	150.000.000	13	150.000.000	
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	13	45.414.900	13	50.000.000	13	55.000.000	13	55.000.000	13	55.000.000	13	55.000.000	
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	13	14.044.800	13	25.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	

Secara ringkas dukungan Kecamatan Karanganyar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja berikut :



**Gambar 4.1**  
**Pohon Kinerja Kecamatan Karanganyar**

### 4.3 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

**Tabel 4.1.**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>✓ Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>✓ Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>✓ Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>✓ Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> <li>✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terlaksananya tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</li> <li>✓ Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan serta pengelolaan potensi lokal.</li> <li>✓ Meningkatnya sinergi dan respon cepat kecamatan dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor.</li> <li>✓ Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan umum.</li> <li>✓ Meningkatnya kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan</li> </ul>	<p><b>A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>• Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>D. PROGRAM</b></p>	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		akuntabel melalui pembinaan dan pengawasan yang terarah.	<p><b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b></p> <p>✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>• Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</li> <li>• Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</li> </ul>	

**Tabel 4.2**  
**Dukungan Kegiatan Kecamatan Karanganyar Terhadap 35 Program Prioritas**  
**Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota**

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kecamatan Karanganyar	Urusan
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mendorong pemanfaatan sport center	Kecamatan Karanganyar Kasie pemberdayaan masyarakat Desa
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	Kecamatan Karanganyar
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Meningkatkan pelayanan publik	Kecamatan Karanganyar, Kasie pelayanan umum
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	Kecamatan Karanganyar, sie trantibunlinmas
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air dan peningkatan forum kerukunan antar umat beragama	Kecamatan Karanganyar, sie trantibunlinmas
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	peningkatan kualitas hidup lansia	Kecamatan Karanganyar, sie pemberdayaan masyarakat
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Pengembangan koperasi merah putih sebagai wadah yang mampu memberikan jaminan ketersediaan modal bagi pelaku usaha dan UMKM,	Kecamatan Karanganyar, sie pemberdayaan masyarakat

### 4.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanganyar**

Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,2	85	85,75	86	86,50	86,75	87

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029.

#### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Karanganyar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

#### **5.2. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2030.

### 5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko

Dokumen Renstra Kecamatan menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	



### **5.3 Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko**

Dokumen Renstra Kecamatan menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



### **5.3 Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko**

Dokumen Renstra Kecamatan menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

